

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah, Pembebasan Tanah, dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002)
- Limbong, Benhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2011)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Murad, Rusmadi, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2013)
- Noor, Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah bagi Bangsa Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006)
- Parlindungan, AP, *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, (Bandung: Mandar Maju, 1993)
- Rubale, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Bayumedia, 2007)
- Soemarjono, Maria SW, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Soimin, Soedharyo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

B. Jurnal dan Karya Ilmiah :

Alam, Wahyu Candra, “*Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kurang dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya.*”(Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2010)

Poluan, Ralph, “*Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) di Lebak Bulus Jakarta Selatan.*” (Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016)

Zarkasih, Hery, “Pelaksanaan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.”(*Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. III No. 8, 2015)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum